

WNI

Mulyanto Minta BPK Audit Data Penerimaan Negara Dari Hilirisasi Nikel

Updates. - WNI.OR.ID

Oct 14, 2022 - 07:02



Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA - Anggota Komisi VII [DPR RI Mulyanto](#) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kebenaran data penerimaan negara dari program hilirisasi [nikel](#). [Mulyanto](#) menilai klaim pemerintah terjadi kenaikan penerimaan negara dari Rp15 triliun menjadi Rp350 triliun sangat janggal dan meragukan.

Ia menduga angka tersebut bukan penerimaan negara melainkan total nilai ekspor [nikel](#) oleh perusahaan smelter asing yang ada di [Indonesia](#). "BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi [nikel](#). Sebab angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan

tidak masuk akal," kata [Mulyanto](#) kepada Media melalui pesan singkatnya, Jumat (14/10/2022).

Ia juga minta pemerintah tidak main-main soal akurasi data penerimaan negara ini. Sebab angka ini akan mempengaruhi laporan keuangan negara. Oleh karenanya ia berharap pemerintah transparan dan dapat menjelaskan besarnya penerimaan negara dari hilirisasi [nikel](#) agar masyarakat tidak salah tafsir.

"Jangan-jangan angka itu bukan penerimaan negara namun sekedar angka ekspor [nikel](#) yang dilakukan oleh industri smelter asing, yang keuntungannya terutama dinikmati oleh investor smelter tersebut. Dan sama sekali, bukan merupakan penerimaan negara. Ini kan beda jauh tafsirnya," ujarnya.

Ditambahkannya, Pemerintah perlu menjelaskan soal ini secara gamblang. Dari sumber apa penerimaan negara tersebut berasal. Karena, selama ini industri smelter bebas dari pajak ekspor atau bea keluar. Penerapan pajak ekspor produk hilirisasi [nikel](#) setengah jadi (NPI) akan berlaku pada tahun 2022. Itu pun baru rencana.

"Sementara mereka juga mendapat insentif pembebasan pajak atau tax holiday (pph badan) selama 25 tahun. Tidak pula membayar pajak pertambahan nilai (ppn). Dan karena tidak menambang dan hanya membeli ore dari penambang dengan harga murah, maka industri smelter tidak membayar royalti tambang sepeserpun," tambah Pak Mul, begitu [Mulyanto](#) biasa disapa.

Bahkan, lanjutnya, Pekerja yang didatangkan dari luar negeri ditengarai tidak menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis, dan merupakan tenaga kerja kasar. Hal ini kembali menggerus penerimaan negara. "Jangan-jangan dengan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal yang super mewah untuk program hilirisasi [nikel](#) yang ada ini malah merugikan kas keuangan negara," katanya.

Karena itu Politisi Fraksi [PKS](#) ini mendesak Pemerintah melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini sebelum berlanjut pada hilirisasi tambang lainnya seperti timah dan bauksit.

"Harus clear dahulu road map tahapan industri dan produk hilirisasinya, sehingga diharapkan benar-benar tumbuh industri dengan nilai tambah tinggi dan dengan multiplier effect yang besar bagi masyarakat. Jangan sekedar hilirisasi yang menjadi subordinat proses industrialisasi di [Cina](#), yang mengeskpor produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah," pungkasnya.

Untuk diketahui Presiden [Joko Widodo](#) (Jokowi) kembali menyampaikan dalam Peresmian Pembukaan Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022), bahwa hilirisasi industri mampu meningkatkan hasil ekspor [Indonesia](#). Dia mencontohkan, nilai ekspor komoditas [nikel](#) bertambah dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun setelah proses hilirisasi.

Menurutnya RI ketuban durian runtuh hingga mencapai Rp 360 triliun melalui hilirisasi [nikel](#) menjadi barang bernilai tambah. Oleh karena itu, untuk mengulang kesuksesan pelarangan ekspor [nikel](#). Kelak, Presiden Jokowi juga akan melarang kegiatan ekspor timah, bauksit hingga tembaga. (ayu/aha)